

EFEKTIVITAS MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Hastuti^{1*}, Mappamiring², Nuraeni Aksa³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to explain how the effectiveness of strategic management in Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). The type of research used is qualitative research that aims to collect information from a number of respondents or informants who are considered to provide information related to the research problem determined by purposive sampling, namely to determine the informants capable of representing a number of informants needed. The results of the research obtained that Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) in Patalassang village has not been effective to help the independence of the village because the management of existing BUMDes has not run maximally this is due to the expertise of the board of BUMDes also still relatively low.

Keywords: effectiveness, strategic management, bumdes

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas manajem strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ditetapkan secara *purposeful sampling*, yaitu untuk menentukan informan-informan yang mampu mewakili sejumlah informan yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Patalassang belum efektif untuk membantu kemandirian desa karena pengelolaan BUMDes yang ada belum berjalan secara maksimal hal ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki pengurus BUMDes juga masih tergolong rendah.

Kata kunci: efektivitas, manajemen strategik, bumdes

* hastuti@gmail.com

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. UU No. 6 Tahun 2014 dapat membantu pemerintah pusat yang dimana sekian lama pemerintah desa hanya cenderung bergantung pada kebijakan pemerintah yang ada di atasnya, yang selama ini hanya menjadi obyek penerima dan penikmat kebijakan. Namun kali ini, pemerintah desa berperan sebagai subyek yang menjadi perencana dan pelaksana pembangunan. Potensi dan

aktivitas ekonomi pedesaan dapat ditingkatkan melalui pembentukan BUMDes ini, maka diperlukan strategi dalam pengelolaannya agar dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan dan pembangunan desa dengan maksud membantu kemandirian desa serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Dalam manajemen strategi sumber daya yang ada harus dipergunakan seefektif mungkin untuk memenuhi tujuan strategis.

Kendala dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lokomotif perekonomian di wilayah pedesaan khususnya di Kabupaten Sinjai, yaitu seperti Kepala Desa belum memahami tentang BUMDes itu sendiri, padahal dapat diketahui bahwa Kepala Desa merupakan tonggak penegak dan merupakan unsur utama dalam pengelolaan sistem pemerintahan dalam meningkatkan dan mengembangkan daerah kekuasaannya dalam hal ini upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pembentukan BUMDes. Kemudian masalah lainnya adalah sumber daya manusia untuk mengelola

di pedesaan yang kurang, disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta inisiatif masyarakat dalam pengembangan BUMDes masih rendah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk agar dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pemerintahan desa, khususnya Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dampak positif yang dimaksud adalah dari segi kemandirian finansial baik pemerintahan desa maupun masyarakat, semangat wirausaha, melalui pemanfaatan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Kemandirian berperan sebagai pondasi dasar terbentuknya pemerintahan daerah atau otonomi daerah dimana sasaran aktivitas utamanya adalah berhubungan dengan kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak, wujud nyata adanya kemandirian dalam pemerintah yaitu terlaksananya proses pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah senantiasa membutuhkan kemandirian atau kemerdekaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga usaha menciptakan kesejahteraan

masyarakat dapat berproses secara terus-menerus secara baik. Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan atau masalah kehidupan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dari berbagai pihak.

BUMDes tidak berjalan dengan baik disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelolanya. Hal tersebut terjadi karena jenis usaha BUMDes tidak sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi didalamnya. Maka dari itu diperlukan pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang masing-masing masyarakat. Apabila BUMDes disosialisasikan kepada masyarakat luas, maka kemungkinan besar dapat membantu mewujudkan tujuan dan maksud dibentuknya BUMDes tersebut.

Peter F. Drucker dalam Moneir (2006:166) mengemukakan bahwa efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran yang sesuai hasil. Sedangkan menurut Emerson dalam Handayani (2000:16) berpendapat bahwa

efektivitas adalah pengukur dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ukuran efektivitas menurut David Krech dkk., dalam Danim (2004:119) adalah:

- a) Jumlah hasil yang dikeluarkan, hasilnya berupa kuantitas atau bentuk fisik dari suatu organisasi program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud adalah dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran.
- b) Produk kreatif, penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja nantinya yang menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- c) Intensitas yang akan dicapai, memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkat intens, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi

Istilah “manajemen” diartikan secara variatif oleh para ahli, tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut. Menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014:92), bahwa manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Donovan dan Jackson melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi

tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (*skill*), dan sebagai serangkaian tugas. Dan berawal dari pendapat Boyatzis, kedua pengarang ini mengemukakan empat klaster kompetensi yang ada dalam manajemen, yaitu:

- a) Klaster manajemen tujuan dan aksi.
- b) Klaster pengarahan terhadap bawahan.
- c) Klaster manajemen sumber daya manusia.
- d) Klaster kepemimpinan.

Henee Aime dkk., (2010:76) mengemukakan suatu penafsiran generik dari konsep manajemen strategik, yakni manajemen strategik adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan manajemen strategik adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi itu, di dalam dua lingkungan, yakni pada satu sisi lingkungan kewenangan khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasi. Sedangkan dari sisi lain berupa lingkungan pengembangan kapasitas terhadap keorganisasiannya. Menurut Sedarmayanti (2014:44), bahwa ketetapan bauran tiga keahlian dasar: teknis, manusia, dan konseptual akan menjamin efektivitas

manajemen strategi suatu organisasi, yaitu:

1) Keahlian teknis, berkaitan dengan apa yang dilakukan dan bekerja dengan sesuatu. Terdiri dari kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk melakukan tugas organisasional. 2) Keahlian manusia, berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan dan bekerja dengan orang. Terdiri dari kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai sasaran. 3) Keahlian konseptual, berkaitan dengan mengapa sesuatu dilakukan dan cara pandang orang terhadap organisasi secara keseluruhan. Terdiri dari kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan karena kompleksitas itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.

Yunus (2016:132) mengemukakan bahwa pemilihan suatu strategi dan struktur untuk terimplementasikan, para manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi. Hubungan antara strategi, struktur dan lingkungan dapat dipandang dari dua perspektif utama. Dalam pandangan pertama, organisasi adalah reaktif terhadap lingkungannya proses perumusan strategi harus memperhatikan lingkungan di mana organisasi beroperasi pada waktu yang

akan datang. Strategi pada gilirannya akan mempengaruhi struktur organisasi dengan uraian sebagai berikut: 1) Strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasional, yang merupakan basis pokok bagi desain organisasi. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan dengan kreativitas dan kebutuhan teknis sangat tinggi. 2) Strategi memengaruhi pemilihan teknologi dan orang-orang yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dan hal ini selanjutnya mempengaruhi struktur yang sesuai. 3) Strategi menentukan lingkungan spesifik organisasi akan beroperasi, ini juga mempengaruhi struktur.

Badan Usaha Milik Desa, bisa disingkat BUMDes atau BUM Desa, adalah amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika di tingkat pusat dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di level provinsi atau kabupaten/kota dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka ditingkat desa dikenal BUMDes. BUMDes, menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Perda

Kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangsinya bagi perekonomian desa.

Adapun tujuan pembentukan BUMDes, yaitu: 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa. 2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa. 3) Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa. 4) Meningkatkan pendapatan desa.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai Bulan Maret-Mei 2018, lokasi penelitian bertempat di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dengan pertimbangan bahwa program BUMDes belum berjalan secara optimal dilihat dari jenis usaha yang masih tergolong rendah disebabkan karena jumlah yang masih terbatas dan kurangnya kreativitas pihak pengelola untuk meningkakan jenis usaha yang dimiliki. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif,

menurut (Sugiyono, 2014:18) metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang ingin melukiskan, menganalisis, menginterpretasikan, melaporkan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti lalu kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan (Creswell 2016:8). Sumber data yakni dat primer dan data sekunder. Informan penelitian yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes di Desa Patalassang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi data. Untuk mengetahui validitas data dalam penelitian ini diperlukan pengabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik yang

digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), triangulasi tersebut adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada pada bab sebelumnya bahwa bagaimana efektivitas manajemen strategik dalam membantu kemandirian desa. Adapun tolak ukur dalam menilai efektivitas dalam manajemen strategik diperlukan tiga bauran keahlian, yaitu: keahlian teknis, keahlian manusia, dan keahlian konseptual. Keahlian teknis adalah penggunaan alat atau teknologi sebagai penunjang kelancaran dalam mengelola BUMDes di Desa Patalassang agar dapat mengurangi tenaga dan waktu dalam proses pengerjaannya. Keahlian manusia adalah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Patalassang yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola badan usaha yang ada. Keahlian konseptual adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh kepala desa sebagai *top manager* dalam organisasi yang dipimpinnya. Yaitu kemampuannya untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam pengelolaan BUMDes agar tujuan yang dibentuknya BUMDes

tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam rangka merealisasikan kondisi Desa Patalassang kedepan telah dibuat rumusan yang tertuang dalam visi dan misi yang diadaptasikan dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kebersamaan dan kekompakan yang tinggi untuk bergotong royong sebagai jiwa masyarakat Desa Patalassang telah tersusun visi sebagai berikut: "Dengan iman dan taqwa kita terapkan disiplin kerja yang jujur, amanah, terbuka serta wawasan yang luas untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di Tahun 2015-2020". Untuk pencapaian visi maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui

pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, Wiraswasta dan Petani. 5) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes Patalassang pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang biasa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi

pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. BUMDes Patalassang merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes Patalassang juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Manajemen strategik adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai efektif atau tidaknya program yang dijalankan Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam membangun desa yang mandiri. Salah satu program yang dijalankan untuk membantu desa dalam mewujudkan tujuannya adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Untuk menunjang efektivitas manajemen strategik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan 3 keahlian yang

lebih dominan. Namun keahlian tersebut masih minim dikalangan para pengelola BUMDes di Desa Patalassang.

Di zaman moderen ini yang semua aktivitas berbasis teknologi diperlukan adanya kemampuan suatu organisasi dalam mengolah datanya menggunakan alat yang canggih seperti halnya komputer dan lain sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patalassang, karena dalam penggunaan alat tersebut masih tergolong minim. Itulah sebabnya Sekretaris Desa Patalassang juga memiliki campur tangan dalam pengelolaan BUMDes yang sebenarnya diluar dari tugasnya. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pihak pengelola melaksanakan tugasnya terutama sekretaris BUMDes itu sendiri. Yaitu Sekretaris BUMDes tidak memiliki keahlian dalam penggunaan komputer. Maka dari itu yang berperan aktif dalam kegiatan hanya direktur dan bendahara BUMDes saja. Sedangkan pengurus lainnya tidak memiliki keterlibatan dalam mengelola aset dan peluang dalam mecetak prestasi desa yang mandiri.

Masyarakat mengeluh tentang pelayanan yang diberikan oleh pengurus BUMDes khususnya dalam pemberian

pelayanan simpan pinjam, pengurus tidak menggunakan komputer sama sekali, hanya menggunakan selebar kartu kontrol dan buku register daftar nama peminjam, hal ini disebabkan karena jika hanya menggunakan kedua jenis itu dapat mengefisienkan waktu dalam pelayanan. Dan seharusnya kartu kontrol yang digunakan sebaiknya ada dua yaitu dipegang oleh bendahara dan juga masyarakat pelaku simpan pinjam agar dapat tercipta transparansi dalam pelayanan sehingga terhindar dari penyimpangan dan kesalahan yang bersifat merugikan kedua belah pihak.

Selama dua tahun berjalan para pengurus tidak memikirkan tentang hal tersebut, padahal ini adalah salah satu prosedur yang sangat penting dilakukan agar tercipta kenyamanan dan keamanan. Sehingga ketika hal kecil tersebut dilakukan maka kemungkinan besar masyarakat akan tertarik untuk bergabung dalam kegiatan simpan pinjam yang ada. Masyarakat ingin dilayani secara penuh dan diperlakukan sebagaimana halnya di perusahaan keuangan yang sudah besar serta melibatkan semua pengurus BUMDes agar pelayanan yang diberikan dapat berkualitas. Jadi semua pengurus dapat berperan aktif dalam pelayanan. Akan tetapi kenyataan yang ada pengurus yang berperan aktif atau yang dikenal

oleh masyarakat hanya bendahara saja, karena yang berperan aktif dalam pelayanan simpan pinjam hanya bendahara. Sedangkan pengelola lainnya hanya datang dalam kegiatan rapat saja. Masyarakat pelaku simpan pinjam tidak ingin melihat uang dari mereka hanya dinikmati oleh orang yang tidak bekerja. optimalnya suatu pelayanan tergantung pada tempat dan alat yang digunakan, oleh karena itu diperlukan dana yang cukup untuk memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat demi tercipta kenyamanan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pinjaman yang tertinggal yang belum dikembalikan oleh para peminjam, mau tidak mau rencana yang sudah diprogramkan sebelumnya juga akan tertunda karena kurangnya dana yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri.

Keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi akan menunjang masa depan organisasi yang digelutinya. Seperti halnya SDM yang dimiliki oleh BUMDes di Desa Patalassang harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengurus BUMDes di Desa Patalassang sama sekali kurang memiliki keahlian dalam bidang kegiatan simpan pinjam, oleh karena itu 2018 adalah berakhirnya masa jabatan

para pengurus olehnya itu Kepala Desa sekaligus sebagai Komisariss BUMDes akan berusaha mengganti pengurus yang lama dengan pertimbangan keahlian dibidang masing-masing. Pengurus yang ada belum mampu memberikan suatu perubahan, hal ini disebabkan karena ditetapkan secara terburu-buru karena tidak ada orang yang bisa diangkat sebagai pengurus pada waktu itu dan juga banyaknya persyaratan yang harus dipatuhi dalam penetapan pengurus. Bukan hanya pertimbangan keahlian tetapi banyak hal yang lebih ketat lagi diantaranya tidak termasuk keluarga dari Kepala Desa.

Pengurus BUMDes dipilih bukan dari keahlian yang dimiliki akan tetapi semata mata karena bukan termasuk keluarga dekat Kepala Desa. Hal ini dilakukan karena menaati peraturan yang ada seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Desa Patalassang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa. Dalam regulasi tersebut tercantum semua persyaratan dalam penetapan pengurus atau pengelolah BUMDes. Dan hal tersebut dipatuhi sepenuhnya Desa Patalassang dalam pengangkatan pengurus BUMDes.

Latar belakang pendidikan bukanlah hal yang paling utama dinilai untuk perekrutan pengurus melainkan hanya melihat jenjang pendidikannya saja. Akan tetapi transaksi simpan pinjam hanya menggunakan sistem yang sederhana saja sehingga jika masalah hitung menghitung sederhana bendahara masih bisa mengontrol karena bendahara juga latar belakang pendidikannya adalah jurusan matematika. Dan alasan selanjutnya yang paling penting dalam pengangkatan pengurus adalah kesiapan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Meskipun dalam perjalanan masih ada pengurus yang lalai dengan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Maka dari itu pengurus dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan BUMDes khususnya kegiatan simpan pinjam agar masyarakat tertarik untuk ikut dalam kegiatan ini. Sehingga keuntungan simpan pinjam yang didapatkan besar, dengan demikian pendapatan pengurus juga akan bertambah. Akan tetapi tuntutan ini tidak mampu dijalankan oleh pengurus karena mereka memiliki lebih dari satu profesi bukan hanya untuk mengurus BUMDes saja. Ini juga dikarenakan para pengurus memiliki alamat yang saling berjauhan sehingga sulit untuk melakukan komunikasi

bersama tentang perkembangan BUMDes kedepan. Bahkan dalam rapat saja masih ada pengurus yang biasanya tidak hadir, ini disebabkan adanya kesibukan lain. Hal yang paling menonjol dalam kepengurusan adalah memilih atau menetapkan seorang pemimpin dalam BUMDes atau yang lebih dikenal Direktur BUMDes harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yang paling penting adalah orang tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan orang lain agar mau bekerja bukan hanya ingin menikmati hasil. Akan tetapi pada kenyataannya direktur BUMDes ini belum masuk dalam kategori pemimpin. Karena belum mampu menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara maksimal. Buktinya selama dua tahun terakhir ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan serta pendapatan BUMDes bahkan keuntungan yang didapatkan hanya mengalami penurunan saja. Jika keuntungan yang didapatkan menurun maka otomatis gaji para pengurus juga akan menurun. Karena gaji mereka tergantung keuntungan yang didapatkan.

Konsep dalam suatu organisasi merupakan perencanaan yang dilakukan sebelum menjalankan suatu proses

penugasan masing-masing bidang atau bagian. Dalam pengelolaan BUMDes konsep yang dimiliki begitu banyak, diantaranya cara yang dilakukan Kepala Desa untuk mensosialisasikan BUMDes kepada masyarakat sudah sangat bagus yaitu memberikan arahan kepada semua aparat atau *stake holder* (pemangku kepentingan) untuk menyampaikan kepada semua masyarakat dalam kegiatan tertentu tentang keberadaan BUMDes atau lebih khususnya adanya kegiatan simpan pinjam di Desa Patalassang untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya terutama usaha menengah kecil. Hal tersebut diperadakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Patalassang. Akan tetapi meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa ada kegiatan simpan pinjam di Desa Patalassang namun yang meminjam dari tahun ke tahun itu-itu saja. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebutuhan mendasar untuk meminjam dan juga tidak sanggup membayar bunga yang dianggap terlalu tinggi. Itulah sebabnya sampai sekarang masyarakat yang meminjam jumlahnya masih terbilang sedikit.

Konsep selanjutnya adalah akan menambah satu demi satu usaha yang ada jika dana yang dimiliki mencukupi

dari Anggaran Dana Desa (ADD). Setelah semua kebutuhan visik masyarakat sudah terpenuhi maka Pemerintah Desa Patalassang akan menambah modal BUMDes dalam menunjang perkembangan BUMDes kedepan. Hal tersebut dilakukan karena melihat minat masyarakat tentang kegiatan simpan pinjam tidak terlalu tinggi. Sehingga akan ditambah lagi satu jenis usaha yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan karena besarnya potensi yang dimiliki oleh Desa Patalassang tentang kegiatan tersebut.

Potensi peternakan dan pertanian di Desa Patalassng sangat besar dibandingkan dengan kegiatan di bidang usaha atau bisnis. Dan untuk tahun 2018 akan ditambah lagi satu jenis usaha BUMDes yaitu penggemukan atau pemeliharaan sapi dan akan melibatkan atau diberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin atau tertarik untuk memelihara. Jadi dengan bertambahnya jenis usaha yang ada maka akan memanfaatkan pula potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Patalassang yang berlatar belakang peternak dan petani. Seandainya kegiatan tersebut diprogramkan setahun yang lalu, jika kita sudah melihat perkembangan kegiatan simpan pinjam seperti apa, maka sekarang sudah bisa

dilihat hasilnya berkembang atau tidaknya jenis usaha tersebut. Karena memang jika jenis usaha penggemukan sapi memerlukan waktu yang lama sehingga modal juga akan kembali dalam waktu yang lama pula, akan tetapi keuntungan yang didapatkan juga besar. Maka diperlukan kesabaran dan ketelatenan dalam usaha peternakan. Itulah alasannya tidak memprogramkan jenis usaha peternakan sebelumnya karena selain keterbatasan dana juga keinginan untuk kembali modalnya lebih cepat agar bisa digekakkan jika keuntungannya juga memadai.

Para pelaku simpan pinjam masih banyak yang mempunyai tunggakan atau pinjaman yang belum lunas namun sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Maka akan diberikan sanksi sosial berupa pengumuman di masjid terdekatnya tentang utangnya yang belum lunas. Namun sampai sekarang para peminjam masih banyak yang belum melunasi utangnya bahkan dari tahun lalu. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian atau malasnya para pengelola untuk menyampaikan secara langsung kepada para peminjam melalui rumah ke rumah. Jika hal tersebut dilakukan maka tidak ada lagi tunggakan yang tertinggal ditangan peminjam yang tidak bertanggungjawab.

Pada tahun 2018 ini pengurus memiliki ide untuk menggunakan sistem baru, yaitu akan diperadakan dua kartu kontrol yang akan dipegang oleh bendahara dan juga pelaku simpan pinjam itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Setelah sekian lama BUMDes ini berjalan khususnya kegiatan simpan pinjam metode yang digunakan tidak efektif karena masih munculnya kecurigaan masyarakat kepada para pengurus tentang pelayanan yang diberikan serta adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pengelola BUMDes khususnya kegiatan simpan pinjam. Namun dari semua konsep tersebut setiap tindakan yang akan dilakukan terlebih dahulu dilakukan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih jelas dari sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang dihadapi oleh BUMDes Patalassang. Karena dalam rapat tersebut semua peserta rapat berhak mengeluarkan pendapatnya, lalu hasil kesepakatan ini kemudian ditindak lanjuti. Namun semua masalah tidak dapat diselesaikan hanya melalui musyawarah saja, melainkan harus diimbangi dengan tindakan. Dan pada kenyataannya para pengurus tidak ada solusi terhadap masalah yang telah

dihadapi. Buktinya BUMDes yang ada tidak ada perkembangan sama sekali bahkan keuntungan yang didapatkan justru menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis sekaligus sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patalassang belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan desa. Karena pengelolaan BUMDes yang ada belum berjalan secara maksimal dan selama dua tahun berjalan BUMDes tidak ada peningkatan baik pelayanan maupun pendapatan atau keuntungan. Melihat para pengelola belum cakap dalam melaksanakan tugasnya disebabkan karena banyaknya kegiatan lain yang harus dikerjakan, serta ada sebagian pengurus atau pengelola yang tidak aktif mengurus BUMDes. Sehingga BUMDes tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena hanya satu atau dua orang yang mau bekerja. Keahlian yang dimiliki pengurus BUMDes juga masih tergolong minim, penggunaan komputer dalam kegiatan ini dapat dikatakan masih minim,

karena masih menggunakan alat tulis menulis manual, selain tidak tersedianya alat, keahlian yang dimiliki pengurus BUMDes juga tergolong rendah. Itulah sebabnya diperlukan kejelian dalam memilih dan menetapkan pengurus, harus dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apabila dilihat dari segi konsep, pengurus belum kreatif dalam mengelola BUMDes sesuai dengan situasi masyarakat Desa Patalassang, semua konsep tentang BUMDes tidak sesuai dengan dana yang ada karena masih banyaknya tunggakan peminjam yang belum dikembalikan sehingga dana yang dipegang oleh Bendahara BUMDes juga kian menipis. Artinya kendala lain yang menghambat pengelolaan BUMDes tersebut adalah karena kurangnya dana yang dimiliki. Sehingga rencana-rencana atau konsep yang diusulkan lebih membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John.W., (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan, (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Handayani, Soewarno. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Heene, Aime. et.al. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Moneir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 1(6)*.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa.